



**Tanoto
Foundation**

Risalah Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Asia Tenggara



Sebagian data dalam policy brief ini berasal dari laporan regional dan kegiatan consultative meeting pada tanggal 9 November 2024 di Yogyakarta, di samping kajian literatur yang dilakukan oleh tim penulis

Tim Penulis :

Pengarah : Vina Adriany, Ith Vuthy, Elis Rosdiawati | **Tim Penulis :** Eka Hermansyah, Muhammad Lutfi Assidiqi, Rizal Nugraha, Iin Afriyanti, Farhatul Kamilah, Intan Fasya Zahara, Insof Waeji, Fitriana Herarti, Assila Prianggi, Tiara Delia, Dwi Anisa Faqumala, Dewinta Dyah Mariana, Maya Lestari, Qonita | **Tim desain :** Mustofa Kamiludin, Arif Try Cahyadi, Doni Septiana | **Tim Data :** Prity Oktora, Virgie Elizabeth, Zami Zainnur, Nafisah Nurul Alfiyani, Luthi Abdul Hakim, Muhammad Rafi Ramdhani, Nurul Sabrina Fauziah, Shafa Mulia Aryadewi

LATAR BELAKANG

Pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI) dapat didefinisikan sebagai proses holistik yang mendukung pertumbuhan kognitif, fisik, emosional, dan sosial anak-anak usia 0-6 tahun. Pengembangan ini mencakup elemen kunci seperti pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, serta perlindungan, dan kesejahteraan, yang semuanya harus ditangani secara komprehensif, sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Komitmen internasional terhadap PAUD diabadikan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.

Di Asia Tenggara, pentingnya pengembangan anak usia dini ditekankan oleh *Southeast Asian Ministers of Education Organization* (SEAMEO), yang memprioritaskan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini sebagai salah satu dari Tujuh Bidang Prioritas SEAMEO untuk 2015-2035. Selain itu, *Nurturing Care Framework* 2018, yang diluncurkan oleh *World Health Organization* (WHO), UNICEF, dan World Bank, mengidentifikasi lima komponen kritis untuk PAUD: kesehatan yang baik, gizi yang memadai, keamanan dan perlindungan, pengasuhan yang responsif, dan kesempatan belajar sejak dini. Prioritas ini semakin ditekankan oleh kesepakatan internasional seperti Deklarasi Tashkent 2022 dan Deklarasi ASEAN 2023, yang memperkuat pemahaman bersama bahwa

investasi dalam PAUD sangat penting untuk mendorong masyarakat yang makmur dan berkelanjutan.

Meskipun telah terbentuk komitmen global dan regional, pengembangan anak usia dini di Asia Tenggara masih menghadapi tantangan terkait pendidikan, gizi, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Dalam mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi yang kuat di antara negara-negara Asia Tenggara untuk saling berbagi praktik baik, menyelaraskan strategi, dan mengembangkan solusi bersama. Beberapa negara di Asia Tenggara telah memiliki pencapaian signifikan dalam berbagai aspek pengembangan anak usia dini, namun kebutuhan koordinasi regional memiliki peran penting terutama untuk menyelesaikan masalah yang kompleks.

Risalah kebijakan ini mengadvokasi peningkatan kolaborasi dalam pengembangan anak usia dini di seluruh Asia Tenggara. Secara garis besar, risalah kebijakan ini menjelaskan praktik-praktik baik, tantangan, dan rekomendasi untuk mendorong pertukaran pengetahuan serta aksi kolektif. Dengan membangun upaya ini, negara-negara Asia Tenggara dapat lebih efektif dalam mengatasi tantangan pengembangan anak usia dini, yang berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang sejahtera dan adil bagi generasi mendatang.

PRAKTIK BAIK DI ASIA TENGGARA

Untuk lebih memahami tantangan pengembangan anak usia dini diatasi di seluruh Asia Tenggara, penting untuk mengeksplorasi praktik baik yang telah mereka terapkan. Praktik baik ini memberikan wawasan berharga tentang strategi dan pendekatan efektif yang disesuaikan dengan konteks unik masing-masing negara. Dengan mempelajari contoh-contoh ini, kita dapat mengidentifikasi pelajaran penting dan peluang potensial untuk kolaborasi lintas negara yang dapat mendorong kemajuan signifikan pada pengembangan anak usia dini.

Berikut ini adalah beberapa praktik baik yang telah diterapkan di kawasan Asia Tenggara:



Brunei Darussalam

► Kebijakan

- Brunei Darussalam Education Policy (1993)
- Children and Young Persons Order (2006)
- The Education Order (2003)
- Compulsory Education Order (2007)
- Inclusive Special Education Policy (2007)
- Child Care Centres Act (Chapter 218) (2006)
- Children and Young Person Act (Cap 219) (2010)
- The National Breastfeeding Policy (2001)
- National Strategy for Maternal, Infant and Young Child Nutrition (MIYCN) (2014)
- National Obesity Taskforce (2024)
- Maternity Leave Regulations (2011)
- National Children Immunisation Programme (2019)
- National Nutrition and Physical Activity Guideline for Child Care Centres (2010)
- National Framework on Child Protection (2020)

► Program

- National Nutrition and Physical Activity Guideline for Child Care Centers (2019)
- National Framework for Child Protection (2020)
- National Strategy for Maternal Infant and Young Child Nutrition (MIYCN) (2014)
- National Children Immunization Programme
- One-year pre-school program for children aged five (Government school)
- Fee-paying pre-school program for children aged 3-5 (Private school)
- Developing Quality National Framework for Early Childhood Care Education (0-5 years old) and Quality National Curriculum Framework for Early Childhood Care (2014)



Cambodia

► Kebijakan

- The National Policy on Early Childhood Care and Development (2010)

► Program

- Early Childhood Care and Development (ECCD) program
- National Nutrition Program



Malaysia

► Kebijakan

- Kebijakan Pendidikan Prasekolah 2013
- Rencana Malaysia ke-12 (2021-2025)
- Education Act 1996 (Act 550)

► Program

- Genius Negara
- Pendidikan pra sekolah
- Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan



Myanmar

► Kebijakan

- Early Childhood Care and Development Work Law (2018)
- Myanmar National Plan of Action for Children (2018-2022)

► Program

- Online Birth Registration Programme (2019)
- Early Friendly Hospital Initiative (2017)
- Infant and Young Child Feeding (2008)
- Baby Friendly Hospital Initiative (2017)



Philippines

► Kebijakan

- The Early Years Act of 2013 (Republic Act No. 10410)
- The Early Childhood Care and Development Act (Republic Act No. 8980)

► Program

- Supplemental Feeding Program



Singapore

► Kebijakan

- Early Childhood Development Centres Act (2017)
- Child and Maternal Health and Well-being Strategy and Action Plan (2021)

► Program

- KidSTART (2016)
- ComLink + (2019)
- Government-supported preschools (2019)
- Kindergarten Fee Assistance Scheme (KiFAS) and KiFAS Start-Up Grant
- Taskforce on Family Violence (2020)



Indonesia

► Kebijakan

- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Perpres No. 25 tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak
- PermenPPPA Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja
- Permen Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren Bidang PP dan PA
- Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak
- SE MenPPPA Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan TPA Berbasis Hak Anak/Daycare ramah anak bagi pekerja di daerah
- SNI RBRA 9169:2023
- SNI TARA 9255:2024
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045
- Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif 2020-2024
- Undang Undang Kesehatan No. 17/2023 dan PP No. 28/2024 mengenai Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan

► Program

- Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (2013)
- Gerakan Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (2017)
- Satu Desa Satu PAUD (2013)
- Bantuan PAUD Layanan Khusus
- BOP/BOSP PAUD
- Penyediaan sarana prasarana satuan PAUD (2022)
- Penyediaan peralatan PHBS (2021)
- Survei Lingkungan Belajar (2022)
- Perencanaan Berbasis Data dan Rapor Pendidikan (2022)
- Keberadaan Bunda PAUD yang mendukung PAUD berkualitas, holistik, dan integratif
- Cuti kehamilan
- Cuti Ayah
- Fasilitas Penitipan Anak (55 TARA)
- Kabupaten/Kota Layak Anak
- Penyediaan Ruang Laktasi di tempat kerja
- Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
- Pedoman Penyelenggaraan TPA Berbasis Hak Anak/Daycare ramah anak bagi pekerja di daerah
- Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
- Taman Bermain Ramah Anak (TARA)
- Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- Pengembangan sistem informasi gizi terpadu (e-PPGBM)
- Integrasi Layanan Primer (ILP)
- pencegahan ibu hamil anemia dan kurang energi kronik
- pelaksanaan surveilans gizi



Timor Leste

► Kebijakan

- Decree-Law 34 May 2023 National Pre-School Education System (2023)

► Program

- Pre-School Education (Program 3-4 years – Playground, 5 years Pre-School, and 6 years Start grade 1 of Basic Education (2008)
- Kinder Garden or Playground
- Intensive Programme or Home Schooling
- Socialization to the community on the benefit of breastfeeding for baby or child (2022)
- Regular health Consultation in the community health center
- Free Health Access (2022)
- Save and Access to Education (2011)



Lao PDR

► Kebijakan

- Decree on Early Childhood Education (2024)
- Education and Sports Sector Development Plan 2021-2025 (2020)
- Lao Education Law (2015) - Amended

► Program

- National Nutrition Strategy to 2025 and Plan of Action (2016-2020)
- UNICEF Early Childhood Development Programs
- Lao PDR Stunting Reduction Program (2019)
- World Food Programme (WFP) Nutrition Programs
- National Strategy for Mother and Child Health (2016-2025)
- Third Global Partnership for Education project (2021-2025)
- Education Sector Development Plan (2021-2025)
- Maternal and Child Health Integrated Program (MCHIP) (2008)
- Food and Nutrition Security Project (2014)
- Adolescent Health Program (2015)
- Newborn Care and Survival Program (2016)
- Mental Health in Maternal Health Initiative (2019)
- National Policy on Birth Registration (2004)
- Social Protection Policy (2015)
- National Action Plan to Combat Violence Against Women and Children (2016)
- Child Poverty Study and Action Plan (2019)



Vietnam

► Kebijakan

- Care and Education (2004)
- Early Childhood Education Reform (2010)
- National Program on Child Protection (2017)

► Program

- Early Childhood Education Universalization Program (2010)
- National Program on Child Protection (2017)



Thailand

► Kebijakan

- The Early Childhood Development Act B.E. 2562 (2019)
- National Child and Youth Development Plan
- National Strategy B.E. 2566-2580 (A.D. 2023-2037 (Amendment)
- The Thirteenth National Economic and Social Development Plan (2023-2027)
- The National Education Plan B.E. 2560 - 2579 (A.D. 2017-2036)
- The Early Childhood Development Plan B.E. 2564 - 2570 (A.D. 2021 - 2027)
- The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (A.D. 2017)
- The National Education Act B.E. 2542 (A.D. 1999) and Amendments on Second National Education Act B.E. 2545 (A.D. 2002) and Third National Education Act B.E. 2553 (A.D. 2010)
- Child and Youth Development Promotion Act B.E. 2550 (2007)
- Education Provision for Persons with Disabilities Act B.E. 2551 (2008)
- The Equitable Education Fund Act B.E. 2561 (A.D. 2018)

► Program

- Early Childhood Development (ECD) Programme (2022-2026)
- First 1000 days Programme 2018-2023
- Platform Pink Book
- Development Surveillance and Promotion Manual: DSPM
- Life-Long Human Development Project for "Early childhood"
- The Little's Scientist House Thailand Project: STEM Education for Early Childhood (2006)

ISU-ISU PADA KOMPONEN LAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

Meski berbagai praktik baik telah diterapkan di negara-negara Asia Tenggara, tantangan tetap ada dalam konsistensi penerapan di semua komponen layanan. Tantangan ini mencakup pendidikan, gizi, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan

kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan analisis berbasis data dan fenomena untuk mengidentifikasi hambatan spesifik yang menghalangi pencapaian penuh tujuan pengembangan anak usia dini di kawasan Asia Tenggara.

1. Layanan Pendidikan

Merujuk pada data Nurturing Care Framework (2023), Angka Partisipasi Kasar (APK) dalam pendidikan anak usia dini di Asia Tenggara masih belum merata, berkisar antara 15% -



94.7%. Secara khusus, partisipasi yang lebih rendah terlihat pada anak-anak usia 0-3 tahun, terutama di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah maupun menengah. Ketimpangan ini muncul dari berbagai faktor seperti pemahaman dan kesadaran yang belum merata tentang pentingnya pengembangan anak usia dini, faktor ekonomi, keragaman karakteristik, serta baru sebagian negara di Asia Tenggara yang menjadikan PAUD sebagai program wajib belajar.

Meskipun akses terhadap layanan PAUD telah mengalami peningkatan, beberapa tantangan tetap ada, seperti terbatasnya ketersediaan layanan PAUD gratis dan kesenjangan akses bagi kelompok rentan, termasuk kelompok ekonomi rendah, daerah terpencil maupun perkotaan, serta anak-anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan dukungan pendidikan anak usia dini akibat keterbatasan fasilitas, stigma, dan diskriminasi. Hambatan lainnya termasuk adanya kesenjangan dalam penyediaan pendidikan inklusif, terutama terkait durasi layanan, variasi program, kualifikasi guru, dan infrastruktur. Kurangnya kerjasama dengan berbagai pihak juga menjadi tantangan dalam memastikan pendidikan yang menyeluruh. Oleh karena itu, permasalahan ini harus diatasi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan pengembangan anak usia dini secara setara, dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan agar semua anak mendapatkan pendidikan usia dini yang merata, holistik, dan sesuai dengan tahapan perkembangan mereka.

2. Layanan Gizi dan Kesehatan

Masalah kesehatan anak, khususnya stunting, masih menjadi tantangan utama di Asia Tenggara. Menurut laporan World Bank (2023), pada tahun 2022 sebanyak 26,4% atau sekitar 14,4 juta anak di Asia Tenggara mengalami keterlambatan pertumbuhan atau stunting. Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik tetapi juga perkembangan kognitif anak, yang secara langsung berdampak pada kualitas hidup dan potensi anak di masa depan. Salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya angka stunting adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan gizi anak, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan. Periode krusial ini membutuhkan asupan nutrisi dan imunisasi yang memadai untuk mendukung perkembangan yang optimal.

Terkait pemenuhan gizi, WHO dan UNICEF menetapkan standar global untuk mencegah malnutrisi pada anak, meliputi Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama, serta pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi sejak anak berusia enam bulan. Sayangnya, capaian terkait komponen-komponen ini masih jauh dibawah target global. Rata-rata IMD di Asia Tenggara hanya berkisar antara 23-67%, di bawah target 80%. Angka ASI eksklusif juga masih rendah, berkisar antara 14-65%, dibandingkan target global sebesar 50% (WHO, 2022). Rendahnya capaian ini menunjukkan bahwa masih ada hambatan yang perlu diatasi, baik dalam bentuk akses terhadap informasi, promosi ASI, maupun ketersediaan makanan pendamping yang bergizi.

Selain itu, kesehatan anak sangat bergantung pada cakupan imunisasi. Imunisasi berperan penting dalam melindungi anak dari



berbagai penyakit infeksi yang dapat memperparah risiko stunting. Namun, di banyak wilayah Asia Tenggara, layanan imunisasi belum merata, terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan terbelakang. Terbatasnya akses pada imunisasi berdampak pada ketahanan tubuh anak terhadap penyakit dan mengurangi efektivitas intervensi gizi yang dilakukan, sehingga anak lebih rentan terhadap malnutrisi dan stunting (WHO, 2022; UNICEF, WHO, & World Bank, 2023).

Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa kesehatan ibu merupakan salah satu prediktor terkuat dalam perkembangan anak. Kondisi kesehatan ibu yang buruk, seperti malnutrisi dan kehamilan di usia remaja (di bawah 20 tahun), berkontribusi langsung pada tingginya angka stunting dan mortalitas bayi. Data dari *Nurturing Care Framework* (2023) menunjukkan bahwa di Asia Tenggara, angka kematian ibu saat melahirkan mencapai 10 per 1.000 kelahiran hidup, dengan angka kematian balita sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Keterbatasan dalam layanan kesehatan ibu, khususnya di wilayah-wilayah terpencil, menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan layanan kesehatan yang merata. Selain itu, kurangnya edukasi tentang pentingnya kesehatan ibu bagi perkembangan anak juga menjadi hambatan besar. Seluruh faktor-faktor inilah yang memicu isu malnutrisi dan stunting pada anak di Asia Tenggara.

3. Layanan Pengasuhan, Perlindungan, dan Kesejahteraan

Di Asia Tenggara, terdapat stereotip gender tradisional yang menyatakan bahwa tugas utama pengasuhan adalah tanggung jawab ibu. Sebaliknya, pandangan tersebut menganggap tanggung jawab ayah hanya pada menggerakkan perekonomian keluarga. Pandangan ini menyebabkan minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Namun, sikap terhadap tanggung jawab pengasuhan mulai berubah,

dengan semakin diakuinya bahwa pengasuhan bukan hanya tanggung jawab ibu, tetapi juga ayah dan bahkan pemerintah. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara telah mulai mengatur hak cuti melahirkan, tetapi belum cukup optimal.



Cuti melahirkan untuk ibu bervariasi antara 8 hingga 26 minggu atau lebih. Sementara itu, cuti bagi ayah masih di bawah 1-2 minggu. Untuk mendorong keterlibatan ayah yang lebih besar, kebijakan yang memperpanjang dan menyetarakan cuti bagi orang tua sangat diperlukan.

Disamping itu, terdapat kebutuhan mendesak akan layanan pengasuhan alternatif (daycare) yang terstandarisasi, terjangkau, dan mudah diakses, terutama bagi orang tua dari latar belakang termarginalisasi. Pola pengasuhan di Asia Tenggara juga umumnya masih menormalkan pendekatan yang ketat dan disiplin fisik sebagai bentuk kepedulian terhadap anak. Anak-anak di wilayah ini, masih menghadapi ancaman dalam lingkungan pengasuhan seperti mendapatkan hukuman fisik atau psikologis. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung kesetaraan kesempatan dalam pengasuhan perlu diupayakan dan diperlukan juga adanya edukasi terkait pola pengasuhan disiplin positif.

Sementara itu, berdasarkan data UNICEF 2021, perlindungan sosial anak di Asia Tenggara berada di bawah 40%, menjadikan pemenuhan hak dan perlindungan mereka sebagai prioritas mendesak. Tantangan global seperti perubahan iklim, *Artificial Intelligence* (AI), peperangan, dan kekerasan menyebabkan anak berada pada posisi interseksionalitas yang rentan terhadap diskriminasi. Kondisi ini semakin meningkatkan kebutuhan akan perlindungan. Salah satu elemen kunci yang dapat dilakukan sebagai upaya pemenuhan perlindungan anak adalah dengan memfasilitasi identitas hukum. Dengan memiliki kejelasan identitas hukum, anak-anak mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, menghindari status kewarganegaraan yang tidak jelas, serta memfasilitasi akses terhadap bantuan pemerintah. Oleh karena itu, kepemilikan identitas hukum bagi semua anak di Asia Tenggara sangat penting untuk menciptakan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang maksimal sebagaimana target SDGs 2030.

BAGAIMANA KITA BISA MAJU BERSAMA?

Pengembangan Anak Usia Dini di Asia Tenggara merupakan elemen krusial dalam menciptakan kesejahteraan dan kesetaraan, namun masih menghadapi tantangan signifikan pada layanan di bidang pendidikan, gizi, kesehatan, pengasuhan, serta

perlindungan anak. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih kuat diantara negara-negara diperlukan menciptakan solusi dari permasalahan yang dialami. Dengan pendekatan yang terkoordinasi, negara-negara di Asia Tenggara dapat memperkuat upaya pengembangan anak usia dini yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, memastikan setiap anak mendapatkan hak yang sama dalam mencapai potensi optimal mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang terangkum dalam rekomendasi - rekomendasi yang dirancang untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan terciptanya layanan pengembangan anak usia dini yang berkualitas dan inklusif di seluruh Asia Tenggara.

Rekomendasi Regional

Rekomendasi regional merupakan rekomendasi yang ditujukan untuk wilayah regional Asia Tenggara.

- Negara-negara di Asia Tenggara perlu berkolaborasi untuk mengembangkan kerangka kerja regional yang komprehensif untuk pengembangan anak usia dini, yang dapat berfungsi sebagai acuan dan panduan dalam pembuatan kebijakan di seluruh wilayah.
- Negara-negara di kawasan Asia Tenggara perlu mendorong kolaborasi antar negara anggota untuk memastikan setiap anak menerima layanan pengembangan awal yang optimal melalui pertukaran praktik baik dan berbagi pengetahuan lintas negara.

Rekomendasi Nasional

Rekomendasi ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing negara, dengan fokus pada penguatan kebijakan dan tindakan nasional:

- Negara-negara perlu meningkatkan dan memperluas layanan pendidikan, gizi, kesehatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan pada pengembangan anak usia dini secara inklusif tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan gender.
- Pemerintah perlu membentuk mekanisme kolaborasi multisektoral yang jelas antar kementerian yang berkaitan untuk meningkatkan layanan pengembangan anak usia dini. Disamping itu, diperlukan kemitraan strategis dengan akademisi untuk penelitian kebijakan, sektor swasta untuk penyediaan fasilitas, serta organisasi

- non-pemerintah untuk implementasi di daerah terpencil. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui forum reguler dan perjanjian kerja sama yang terukur.
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan anak usia dini melalui optimalisasi peran Kementerian Keuangan. Fokus pendanaan perlu diarahkan pada program-program pengembangan anak usia dini terutama untuk anak-anak dari kelompok rentan dan terpinggirkan. Dukungan tambahan dari kemitraan dengan lembaga donor perlu ditujukan untuk penguatan kebijakan yang mendukung perluasan akses terhadap layanan PAUD HI dan efektivitas.
- Memperkuat inisiatif di tingkat kabupaten dan kota dengan mendorong pemerintah pusat dan lembaga donor untuk menyediakan program yang responsif serta mengalokasikan anggaran yang memenuhi kebutuhan spesifik dalam pengembangan anak usia dini. Selain itu, kebijakan yang mendukung peningkatan alokasi anggaran bagi program pengembangan anak usia dini perlu dipertahankan.
- Pemerintah perlu membangun sistem data terintegrasi yang mencakup informasi terkait Pengembangan Anak Usia Dini dari berbagai kementerian. Sistem ini harus didukung oleh mekanisme koordinasi antar lembaga untuk memastikan konsistensi data yang dapat diakses secara mudah oleh pemangku kepentingan.
- Negara-negara yang memiliki kebijakan nasional tentang pengembangan anak usia dini perlu membentuk sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data untuk menilai efektivitas program secara berkala yang mencakup pencapaian indikator perkembangan anak, kualitas layanan, serta penggunaan anggaran.
- Negara-negara yang belum memiliki kebijakan pengembangan anak usia dini, hendaknya melakukan pilot project disertai evaluasi awal yang bertujuan untuk mengukur dampak program dan mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan sebelum implementasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

